

ABSTRAK

**MANAJEMEN POLITIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DALAM PENYELENGGARAAN INDUSTRIALISASI MIGAS**

M. Miftakhul Khayri Kusuma

Studi ini dimaksudkan untuk memahami dan mengkaji peran pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan industrialisasi migas. Dalam banyak kasus, kegiatan pertambangan jamak diiringi dengan konflik. Maka dari itu negara akan berupaya maksimal menciptakan situasi kondusif untuk mendukung industrialisasi migas, terlebih lagi adanya potensi kontribusi besar yang dapat diperoleh darinya.

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Bojonegoro, dimana di wilayah ini terdapat Lapangan Banyuurip yang merupakan salah satu aset utama migas nasional. Ladang minyak ini mampu menopang sekitar 20% produksi minyak nasional. Namun, karena keterbatasan kemampuan negara, maka eksploitasi ladang migas ini dilakukan melalui mekanisme Kontrak Kerja Sama (KKS). Untuk itulah Kabupaten Bojonegoro menjadi sebuah obyek penelitian yang cukup merepresentasikan kondisi kontrak kerja sama pertambangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam sebagai upaya pengumpulan data. Subyek yang diambil adalah aparatur pemerintahan daerah, perangkat desa, dan elit masyarakat di sekitar lokasi industri migas.

Manajemen politik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam penyelenggaraan industrialisasi migas adalah menganalisis permasalahan dasar, merumuskan aspek antisipatif, mendirikan kecamatan baru, mengamankan simpul-simpul elit dengan berbagai jatah pekerjaan maupun CSR, memberi jatah beras tiap bulan bagi warga terdampak, dana pendidikan bagi siswa usia SMA, penempatan aparat keamanan di sekitar lokasi proyek, memanfaatkan kerusuhan di lokasi proyek untuk menekan perusahaan agar mau membuka akses bagi pemerintah daerah, dan membentuk persepsi publik melalui media massa. Sedangkan kontribusi industrialisasi migas di Kabupaten Bojonegoro adalah *pertama*, bagi pemerintah Kabupaten yaitu berupa perolehan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan *Participating Interest* (PI). *Kedua*, bagi pemerintah desa adalah program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

Kata kunci: *kontribusi, Kontrak Kerja Sama, industrialisasi migas, manajemen politik*

ABSTACT

**POLITICAL MANAGEMENT OF PEMERINTAH KABUPATEN
BOJONEGORO FOR OIL AND GAS INDUSTRIALIZATION**

M. Miftakhul Khayri Kusuma

The aim of the study was to understand and assess the role of local government in implementation of oil and gas industrialization. In many cases, mining activities usually accompanied by conflicts. Therefore, the state will makes every effort to create a stable situation to support the oil and gas industrialization. Moreover, there is potention of huge contribution that can be gained from it.

The research is located at Bojonegoro Regency, where is in this region located banyuurip oil field, which is one of the major national assets of oil and gas. This oil field can produce approximately 20% of total national oil production. However, due to the limited ability of the state, the exploitation of oil and gas field is done in the mechanism of Join Operating Contract / Kontrak Kerja Sama (KKS). Thus, Bojonegoro Regency became an object study that can represented the condition of join operating contract mining in Indonesia. This study used a qualitative approach that conducted with an in depth interview as a data collection effort. The subjects taken in this study were local government officials, village officials and the elite communities around the oil field industrion.

The conclusion is, political management of Bojonegoro Regency Government (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro) for implementation of oil and gas industrialization is, to analyze the underlying problems, formulate the anticipative aspect for the future, establish new sub-district, securing elite communities around oil field location with various jobs allotment and Corporate Social Responsibility (CSR), giving monthly rice rations to the citizens around oil field location, scholarship for students high-school age, placement of security personnel around the project sites, taking advantages of unrest at the project site to push the company so that the local government can open the access to the company and shaping the public perception through the media. The oil and gas industrialization's contributions in Bojonegoro Regency is, the first, for the local government, in the form of oil and gas profit sharing fund / Dana Bagi Hasil (DBH) and participating interest. The second, for the village government, in the form of Corporate Social Responsibility (CSR) and village fund allocation / Alokasi Dana Desa (ADD) which is come from oil and gas profit sharing fund.